

TESIS

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN SINJAI**

***(ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN DEVELOPING TOURISM
POTENTIAL IN SINJAI REGENCY)***



Oleh:

NURUL MAWAHDA

E062201003

ILMU PEMERINTAHAN

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN SINJAI**

*(ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN DEVELOPING TOURISM
POTENTIAL IN SINJAI REGENCY)*

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**

Disusun dan Diajukan Oleh :

NURUL MAWAHDA

E062201003

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN SINJAI

Disusun dan diajukan oleh :

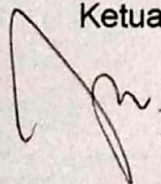
NURUL MAWAHDA

E062201003

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal 15 Februari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan.

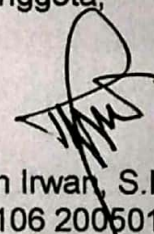
Menyetujui
Komisi Penasehat

Ketua,



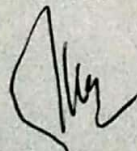
Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si
NIP. 19601123198603 200 1

Anggota,



Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si
NIP. 19790106 200501 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan,



Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
NIP. 19630921 198202 2 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin,




Prof. Dr. H. Armin, M.Si
NIP. 19651109-199103 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Mawahda

NIM : E062201003

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Nurul Mawahda

ABSTRAK

NURUL MAWAHDA, Nomor Pokok E062201003, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun tesis dengan judul: “**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN SINJAI**”, dibawah bimbingan Prof. Dr. Dr. Rabina Yunus, M.Si sebagai pembimbing I dan Dr. A. Lukman Irwan, S.IP.M.Si sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang Bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sinjai dan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *deskriptif*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan *in dept interview* (wawancara secara mendalam), observasi, penelusuran data *online*, dan studi pustaka. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan dan menggambarkan data yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pengaturan objek wisata yang ada di Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Objek Wisata Nomor 5 Tahun 2012 dimana dalam perda ini hanya lima objek wisata yang saat ini memiliki perda retribusi; (2) Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini yang terlibat dalam pengembangan objek wisata diantaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku perangkat daerah yang diberi wewenang urusan pemerintahan dibidang perekonomian dan Unit Pelaksana Tugas Daerah selaku penanggung jawab pengembangan objek wisata; (3) Dalam pengembangan potensi pariwisata di kabupaten Sinjai melakukan analisis fungsi pemerintah terkait fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan; (4) faktor- faktor yang mempengaruhi pengembangan objek wisata terdapat tiga faktor penting diantaranya infrastruktur, promosi dan keamanan sebagai penunjang yang lain dalam dalam hal pengembangan potensi pariwisata.

Kata Kunci : peran , pengembangan, pariwisata dan pemerintah.

ABSTRACT

NURUL MAWAHDA, Main Number E062201003, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Compiling a thesis with the title: "**ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN DEVELOPING TOURISM POTENTIAL IN SINJAI REGENCY**", under the guidance of Prof. Dr. Dr. Rabina Yunus, M.Si as supervisor I and Dr. A. Lukman Irwan, S.IP.M.Si as supervisor II.

This research tries to describe the role of Tourism and Culture Department and also to find out the factors which influence the development of tourism potential in Sinjai Regency. The research used descriptive qualitative method, where the data are collected by observation, searching the data via online, literature studies, and interviews the informant in depth to clarify and get the valid data. Therefore, all the data gathered analyzed qualitatively by explaining and describing the data in detail.

This research find out that: (1) all of the tourism object arrangement in Sinjai Regency conducted base on the Regional Regulation about Tourism Object Retribution No. 5, 2012, the regulation stated that there are five tourism objects have got the regulation of tourism object retribution; (2) The Department of tourism and culture as a representative of the local government in the Sinjai Regency has a role in developing tourism objects in the region.; (3) In analyzing the government role In developing the tourism potential in Sinjai regency such as analyze government functions related to regulatory, service, development of the public facilitations and empowerment; (4) there are 3 (three) main factors that influence in developing the tourism objects namely, infrastructure, promotion and security as other supports in developing tourism potential.

Keywords: role, development, tourism and government.

KATA PENGANTAR

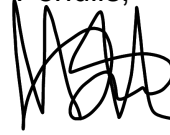
Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan kasih-Nya sehingga Tesis yang berjudul, **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Sinjai”**, terselesaikan sesuai dengan rencana penulis. Pencapaian ini tidak terlepas dari kontribusi banyak orang sehingga pada lembar tesis ini saya berterimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Pemerintahan Daerah Pasca Sarjana S-2 Universitas Hasanuddin.
4. Dosen Pembimbing yaitu Prof. Rabina Yunus, M.Si dan Dr. A.Lukman Irwan, M.Si yang senantiasa bersabar dalam mendidik penulis.
5. Dr. A. Muhammad Rusli, M.si, dan Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si selaku Dosen Penguji yang selalu memberi kritik dan saran membangun bagi penulis.
6. Ayah Tercinta, Abdul Asis, dan Ibu Tercinta Baddare
7. Saudara- saudara penulis, Kak Usran, Kak Muhammad Arfah, Kak Asrul Asis, Adik Miftahul Jannah dan Khairul Asis.
8. Saudara sepupu terkhusus dari pihak ibu dan seluruh anggota keluarga lainnya.
9. Sahabat seperjuangan Sunaria, Risna, Ela dan juga terkhusus Fitri teman seataap.
10. Sahabat-sahabat CCS yang selalu memberikan semangat membangun bagi penulis.
11. Kawan – kawan Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020.
12. Segenap bidang akademik Pascasarjana FISIP Unhas.

Sekian, kritik dan saran sangat dibutuhkan dalam pengembangan karya ini. Wassalam.

Makassar, 15 Februari 2022

Penulis,



Nurul Mawahda



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Fungsi Pemerintah.....	8
2.1.1 Fungsi Pelayanan.....	9
2.1.2 Fungsi Pengaturan.....	12
2.1.3 Fungsi Pembangunan.....	13
2.1.4 Fungsi Pemberdayaan.....	14
2.2 Peraturan Bupati Sinjai No.37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	16
2.3 Fungsi Pemerintahan Daerah	21
2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....	21
2.3.2 Penyelenggara Pemerintah Daerah.....	22
2.3.3 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah.....	24
2.4 Pengembangan Potensi Pariwisata.....	26
2.5 Potensi Wisata Daerah.....	28
2.6 Penelitian Terdahulu	30
2.7 Kerangka Konseptual	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.2 Tipe Penelitian.....	33
3.3 Sumber Data	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Informan	35
3.6 Analisis Data	35
3.7 Deskripsi Fokus.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sinjai	40
4.1.1 Sejarah Kabupaten Sinjai	40
4.1.2 Kondisi Fisik Kabupaten Sinjai	43
4.1.3 Keadaan Penduduk	45
4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Sinjai	46
4.1.4.1 Visi Kabupaten Sinjai	45
4.1.4.2 Misi Kabupaten Sinjai.....	46
4.2 Gambaran Umum Taman Hutan Raya (TAHURA)	48
4.2.1 Sejarah Taman Hutan Raya (TAHURA)	48
4.2.2 Kondisi Fisik Taman Hutan Raya (TAHURA)	52
4.2.3 Aksesibilitas.....	53
4.2.4 Kondisi saat ini	54
4.2.5 Sarana dan Prasarana	59
4.3 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.....	58
4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	59
4.3.2 Personil.....	61
4.4 Potensi Pariwisata di Kabupaten Sinjai.....	87
4.4.1 Rencana Anggaran Pariwisata Kab. Sinjai.....	90
4.5 Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sinjai.....	94
4.5.1 Fungsi Pengaturan.....	95
4.5.2 Fungsi Pelayanan.....	103

4.5.3 Fungsi Pembangunan.....	112
4.5.4 Fungsi Pemberdayaan.....	120
4.6. Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Sinjai.....	129
BAB V PENUTUP	133
5.1. Kesimpulan.....	133
5.2. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Nomor	halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual	31
Gambar 2. Spesies endemik Tahura Abdul Latief	54
Gambar 3. Pemandangan Alam Objek wisata Tahura	56
Gambar 4. Air terjun Wae Lulu'e dan Air terjun Wae Buru'e,.....	57
Gambar 5. Air terjun Wae Lulu'e dan Air Panas Belerang.....	58
Gambar 6. Aplikasi Ayo ke Sinjai.....	116
Gambar 7. kerajinan tangan khas objek wisata TAHURA.....	121

DAFTAR TABEL

Nomor	halaman
Tabel 1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 2 Nama-nama Bupati yang pernah menjabat	42
Tabel 3 Luas Wilayah Kabupaten Sinjai perkecamatan	43
Tabel 4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk	45
Tabel 5 Jenis Satwa Yang Teridentifikasi di Lokasi Pengamatan Air Terjun Wae Lulu'e Kawasan Tahura Abdul Latief.....	55
Tabel 6 Sarana dan Prasarana TAHURA Abdul Latief.....	61
Tabel 7 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	61
Tabel 8 Jumlah Pegawai non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin .	60
Tabel 9 Potensi Wisata Alam Di Kabupaten Sinjai	88
Tabel 10 Rencana Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020.....	91
Tabel 11 Sasaran pembangunan program kepariwisataan 2020.....	91
Tabel 12 Data kunjungan wisatatawan tahun 2017-2020.....	93
Tabel 13 Data Pemakaian Hotel Kabupaten Sinjai Tahun 2020.....	93
Tabel 14 Objek wisata yang di kelolah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	97
Tabel 15 Sarana dan prasarana yang tersedia di objek wisata TAHURA	99
Tabel 16 Jumlah Realisasi Pengunjung Berdasarkan PAD Objek Wisata Kabupaten Sinjai	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan sektor pariwisata dikenal sebagai pembangunan multi-sektor yang melibatkan banyak pihak, baik pemerintah pusat maupun provinsi dan daerah kabupaten itu sendiri. Serta lintas sektor yang tidak hanya melibatkan instansi pemerintah namun juga sektor swasta, bahkan masyarakat dan wisatawan secara umum. Marpaung dalam Prasetyo (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2013) menyatakan bahwa “Objek wisata adalah dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya objek wisata disuatu daerah kepariwisataan sulit untuk dikembangkan”. Objek daya tarik sangat erat hubungannya dengan *Travel motivation* atau *travel fashion*, karena wisatawan ingin mengunjungi serta mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya.

Yoeti (2002) berpendapat bahwa berhasilnya suatu tempat wisata hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3A yaitu atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*). Direktorat Jendral Pariwisata Republik Indonesia yang menyebutkan perkembangan produk wisata dikaitkan atas 4 faktor yaitu:

1. Pertama, *attractions* (daya tarik): *site attractions* (tempat-tempat bersejarah, tempat dengan iklim yang baik, pemandangan indah), event attractions (kejadian atau peristiwa misalnya kongres, pameran, atau peristiwa lainnya) ;

2. Kedua, *amenities* (fasilitas) tersedia fasilitas yaitu: tempat penginapan, restoran, transport lokal yang memungkinkan wisatawan berpergian, alat-alat komunikasi;
3. Ketiga, *accessibility* (aksesibilitas) adalah tempatnya tidak terlalu jauh, tersedia transportasi ke lokasi, murah, aman, dan nyaman;
4. Keempat, *tourist organizaion* untuk menyusun kerangka pengembangan pariwisata, mengatur industri pariwisata dan mempromosikan daerah sehingga dikenal banyak orang.

Pengertian Pariwisata secara etimologi pariwisata berasal dari dua kata yaitu “pari” yang berarti banyak atau berkeliling, sedangkan pengertian “wisata” berarti pergi. Didalam kamus besar Indonesia pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Sedangkan pengertian secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula. Menurut Koen Meyers (2009) Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap ataupun mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang, ataupun liburan. Pariwisata menjadi aktivitas yang kebanyakan orang lakukan untuk mendapat suatu pengalaman yang baru ataupun pengalaman yang berulang. Sedangkan menurut Undang – undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang

atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Keunikan suatu wilayah salah satu daerah di provinsi Sulawesi Selatan lebih khususnya lagi di kabupaten Sinjai mengantarkan penelitian ini untuk lebih mendalami lagi motivasi penelitian.

Wilayah dengan kondisi geografis yang cukup unik dengan gabungan daerah dataran tinggi pada pegunungan, dataran rendah disekitar pantai serta wilayah gugusan pulau menjadikan Kabupaten Sinjai salah satu wilayah di provinsi Sulawesi Selatan yang cukup memiliki daya tarik tersendiri untuk diteliti dari segi objek wisatanya. Berbagai objek wisata di kabupaten Sinjai cukup unik untuk diteliti namun, untuk lebih mendapatkan penelitian yang lebih, fokus peneliti mengantarkan untuk mengambil salah satu lokasi yang dianggap untuk bisa dijadikan sebagai fokus penelitian yaitu Taman Hutan Raya Abdul Latief. Salah satunya Taman Hutan Raya Abdul Latief yang terletak di Kecamatan Sinjai Borong. Berdasarkan SK. Menhut No. 434 Tahun 2009, seluas 860,49 Ha, Taman Hutan Rakyat Abdul Latief ditetapkan menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Hutan Raya Abdul Latief. Taman Hutan Rakyat Abdul Latief atau yang lebih dikenal dengan Tahura Sinjai di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Peneliti memandang bahwa suatu objek wisata dalam hal ini Taman Hutan Raya perlu adanya perencanaan dalam membangun, oleh sebab itu peran pemerintah daerahlah menjadi aktor penting dalam membangun daerah, dimana perannya dalam dalam pengembangan ke arah yang lebih baik lagi

dengan tetap melihat dari segi pelayanan, pengaturan, pembangunan dan pemberdayaan. Objek wisata yang telah ada apakah pemerintah masih dalam tahap membangun dan merencanakan suatu tahap yang ingin dicapai, melihat kondisi yang ada terdapat beberapa objek wisata yang ada dalam kasusnya akses kelokasi wisata dapat dikatakan belum sesuai harapan.

Selain itu pandangan dari masyarakat terkait suatu objek wisata juga merupakan suatu hal yang dianggap penting untuk menjadi tolak ukur terhadap kinerja pemerintah daerah mengingat dengan adanya suatu objek wisata di suatu daerah ada masyarakat juga merasakan dampaknya, baik itu dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Terkait adanya suatu objek wisata di suatu tempat antara pemerintah dan masyarakat perlu adanya komunikasi yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi dimana keselarasan akan kinerja pemerintah yang sesuai harapan. Berbicara rencana kedepan adakah suatu langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek objek wisata yang ada di Sinjai.

Berdasarkan latar belakang yang diangkat penelitian yang dilakukan berobjek wisata alam yang ada di Sinjai Borong yaitu Taman Hutan Raya Abdul Latief sebagai sampel penelitian. Kondisi sementara dari obek wisata tersebut seperti kurangnya kepuasan dari segi sarana dan prasaran dan infrastruktur, selain itu kurangnya informasi-informasi terkait lokasi objek wisata. Petugas yang ada juga kurang dibekali pengetahuan yang memadai untuk mampu memberikan pengetahuan yang diperlukan pengunjung objek wisata, sehingga terkadang kunjungan yang dilakukan biasanya hanya sekali tanpa tertarik lagi

untuk datang kembali, seperti yang diketahui bahwa suatu objek wisata perlu untuk meninggalkan kesan yang baik sehingga pengunjung objek wisata mendapat semacam dorongan untuk berkunjung kembali.

Penelitian ini secara garis besar diangkat dikarenakan belum optimalnya pengembangan potensi destinasi dan daya tarik wisata yang akar masalahnya sendiri dikarenakan Infrastruktur pendukung pariwisata masih sangat terbatas, kualitas sumber daya manusia pariwisata masih rendah, pengembangan pasar dan pola pemasaran pariwisata cenderung konvensional melalui berbagai media namun pada tempat dan waktu yang kurang sesuai. Semua tidak terlepas dari pihak - pihak terkait seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai pengelola objek wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief, masyarakat sekitar objek wisata dan serta pengunjung objek wisata tersebut dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya demi mendukung kelangsungan pariwisata yang berkembang kearah yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Sinjai mempunyai beberapa objek wisata yang dalam merencanakan pengembangannya perlu lebih diberi perhatian lebih oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidangnya masing masing. Penelitian ini diangkat melihat sejauh mana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menjalankan fungsi pemerintah terkait perannya dalam pelayanan, pengaturan, pembangunan dan pemberdayaan objek wisata yang ada di kabupaten Sinjai.

Dapat disimpulkan dari pandangan latar belakang diatas maka timbul suatu pertanyaan penelitian diantaranya.

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sinjai dalam pengembangan objek wisata di kabupaten Sinjai ?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan potensi objek wisata di Taman Hutan Raya Abdul Latief Sinjai Borong kabupaten Sinjai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjelaskana bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembanngan objek wisata di kabupaten Sinjai.
2. Untuk menjelaskan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan potensi objek wisata di Taman Hutan Raya Abdul Latief Sinjai Borong kabupaten Sinjai .

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pijakan bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan sumbangan akademik yang bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengembangan ilmu pemerintahan pada khususnya.

2. Manfaat praksis

Diharapkan agar menjadi bahan masukan bagi pemerintah kabupaten Sinjai, para perencana dan pengelola kegiatan pariwisata di kabupaten Sinjai dalam upaya pengembangan sektor pariwisata daerah.

3. Dari segi metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai lebih yang selanjutnya akan dipadukan dengan penelitian penelitian ilmiah lainnya, terutama yang mengkaji tentang masalah pengembangan potensi pariwisata daerah yang ada di kabupaten Sinjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fungsi Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap

anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Diruang lingkup yang berbeda dimana masyarakat dapat memperluas tugas dan fungsi pemerintah yang tidak hanya sebatas melindungi melainkan juga sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat tidak wajib lagi sebagai pelayan dari pemerintah seperti zaman kerajaan terdahulu ataupun pada masa penjajahan namun, justru pemerintahlah yang melayani masyarakat, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Berdasarkan uraian tersebut pemerintah memiliki fungsi pemerintah yaitu:

Fungsi Primer

Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Maksudnya ialah fungsi primer dari pemerintah hal yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi apapun.

Fungsi primer dibedakan menjadi beberapa hal :

2.1.1 Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Pelayanan publik pada dasarnya

menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pelayanan dalam hal ini ada hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat dilakukan dengan strategi strategi yang dapat membangun sistem pelayanan yang baik untuk mewujudkan kualitas dari kebijakan publik yang baik pula. Perangkat birokrasi yang ada baru dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas apabila kinerjanya selalu didasarkan pada nilai-nilai etika pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang baik tentu sangat bergantung oleh beberapa aspek, yaitu : sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan. Dalam hal ini pemerintah harus benar-benar memenuhi keempat aspek tersebut, karena dengan begitu, masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga, akan tercipta suatu sistem yang baik sehingga keberlangsungan jalanya pemerintahan melalui kebijakan publik dapat berjalan dengan baik pula. Terdapat beberapa unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*)

2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (*costomer*) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

Pemberian pelayanan publik oleh aparat pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. karena itu, kedudukan aparat pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

2.1.2 Fungsi Pengaturan

Fungsi pengaturan dikatakan sebagai fungsi primer, karena pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (powerful) oleh yang diperintah (powerless). Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat. Pemerintah memiliki fungsi regulating (pengaturan) ialah pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan entah berupa peraturan pemerintah, ataukah peraturan-peraturan yang lain. Sebagian maksud dari fungsi ini ialah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan. Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder merupakan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pemberdayaan maupun di bidang pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Maksudnya semakin meningkat taraf hidup masyarakatnya, maka semakin meningkat pula bargaining position, akan tetapi, semakin

integrative masyarakatnya, hal ini akan mengurangi fungsi pemerintahnya. Fungsi sekunder dibedakan menjadi dua fungsi pemerintah yaitu fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan.

2.1.3 Fungsi Pembangunan

Fungsi ini dikategorikan sekunder, karena fungsi ini dilakukan apabila kondisi masyarakat melemah. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau negara berkembang dan terbelakang sedangkan negara maju akan melaksanakan fungsinya seperlunya saja. Fungsi pembangunan dijalankan apabila situasi dan kondisi masyarakat mulai melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera).

Fungsi ini akan banyak di temui di negara-negara berkembang sedangkan, untuk Negara maju fungsi ini hanya akan dilakukan seperlunya. Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

2.1.4 Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini akan dijalankan oleh pemerintah apabila masyarakat sudah tidak mempunyai skill maupun kemampuan untuk bisa keluar zona aman disini tugas pemerintah di fungsi pemberdayaan ini. Salah satu contoh yaitu ketika kondisi masyarakat dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan, dalam taraf kemiskinan, dalam keadaan tertindas, dan lain sebagainya. Fungsi Pemerintah ini harus mampu membawa serta mengeluarkan masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud ialah agar mampu mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat baik melalui penyuluhan atautkah sekolah lapangan sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar masyarakat tidak ketergantungan terhadap pemerintah. Semakin berkurang sehingga, hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan tujuan negaranya.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan

masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

Setiap komponen yang sudah ada memiliki kemitraan yang kuat dan saling terkait yang pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi pemerintah. Sistem pemerintahan di suatu negara pada umumnya akan memiliki satu sistem dan satu tujuan utama, yaitu menjaga stabilitas negara itu. Sistem pemerintahan harus memiliki fondasi yang kuat, tidak ada yang bisa mengguncangnya. Sistem pemerintah di suatu negara tidak harus statis. Karena dalam sistem pemerintahan statis, ini akan membawa sejumlah

kerugian bagi pemerintah di masa depan, terutama jika tidak hanya statis tetapi juga absolut.

2.2 Peraturan Bupati Sinjai No.37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73), diubah sebagai berikut:

1. Diantara huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1 dan diantara huruf d dan huruf e ayat (3) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- 1) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengembangan promosi pariwisata, kerjasama dan hubungan antar Lembaga dan pemasaran pariwisata;
- b. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan standar, pedoman, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan promosi pariwisata, kerjasama dan hubungan antar lembaga serta pengembangan pasar pariwisata;
- c. pelaksanaan layanan pengembangan promosi pariwisata, kerjasama dan hubungan antar lembaga serta pengembangan pasar pariwisata;
- d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan promosi pariwisata dan pemasaran pariwisata;
- d1. pelaksanaan dan pengelolaan sumber pendapatan anggaran daerah wisata pada sektor pariwisata; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan promosi pariwisata;

- g. pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- b. melaksanakan penyusunan pelaksanaan standar, pedoman, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- c. melaksanakan layanan pengembangan promosi pariwisata;
- d. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan promosi pariwisata;
 - d1. melaksanakan dan mengelola sumber pendapatan anggaran daerah wisata pada sektor pariwisata; dan
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan promosi pariwisata;
- g. melaksanakan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata kepada Kepala Dinas; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Diantara huruf h dan huruf i ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- 1) Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang pengembangan pasar pariwisata.
- 2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata;
 - c. menyusun rencana kegiatan di bidang pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
 - d. melakukan pembinaan keterpaduan pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
 - e. melakukan layanan pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;

- f. menyusun standar administratif serta dokumen dalam pelaksanaan pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- g. melakukan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- h. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- h1. melakukan pengelolaan penerima Pendapatan Asli Daerah pada sektor pariwisata;
- i. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

2.3 Fungsi pemerintahan daerah

2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi:12

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Menurut Suhady dalam Riawan Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the*

affairs of men/women in a nation state, city, ect Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.

2.3.2 Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan Pasal 19 ayat (3)

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi

wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Sementara itu Hak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pemimpin daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa kewajiban,yaitu :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan

- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Mengelola administrasi kependudukan
- l. Melestarikan nilai sosial budaya
- m. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

2.4 Pengembangan Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata hendaknya dirancang dan dibangun secara profesional dalam bentuk pengembangan potensi pariwisata sehingga dapat menarik wisatawan dan mendatangkan jasa layanan yang sangat berguna bagi perkembangan daerah, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan itu sendiri merupakan suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun bagi pemerintah. Disamping itu pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun masyarakat.

Karena itu Suwanto, menyatakan bahwa upaya pengembangan pariwisata menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 5 unsur:

1. Objek dan daya tarik wisata;
2. Prasarana wisata,
3. Sarana wisata;
4. Infrastruktur;
5. Masyarakat/ lingkungan

Kemudian Sondakh, menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat tiga faktor yang penting dalam pengembangan pariwisata, yaitu :

1. Perbaikan Infrastruktur ;
2. Perbaikan Promosi dan

3. Perbaikan Keamanan.

Dalam rangka pengembangan pariwisata ini diperlukan pendekatan terhadap tiga aktor utama yang berperan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata menurut Pitana dan Gayatri tiga aktor tersebut adalah Masyarakat; Swasta yang bergerak di sektor pariwisata dan ; Pemerintah. Terkait dengan peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata Pendit menyebutkan dua faktor penting terkait peran pemerintah (politik) suatu negara, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, yaitu yang secara langsung dan secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan industri pariwisata tersebut. Pertama yang secara langsung mempengaruhi adalah sikap pemerintah terhadap kunjungan wisatawan, kedua secara tidak langsung yaitu adanya situasi dan kondisi yang stabil dalam perkembangan politik ekonomi serta keamanan dalam negara atau daerah itu sendiri, pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan peningkatan sektor pariwisata, lalu rakyat mendukung berbagai kebijakan terkait pariwisata yang telah dikeluarkan oleh pemerintah .

Dengan demikian pengembangan potensi pariwisata pada dasarnya merupakan suatu strategi dan upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat secara sinergi guna mendorong tumbuh dan kembangnya sektor pariwisata yang akan melahirkan iklim ekonomi yang kondusif bagi negara, daerah serta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. itu sendiri.

2.5 Potensi Wisata Daerah

Potensi kepariwisataan merupakan objek yang mempunyai kekuatan dan nilai tambah untuk dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata. Potensi pariwisata dapat digolongkan menjadi:

1. Potensi Alam Potensi alam adalah keadaan dan jenis flora dan fauna suatu daerah, bentang alam suatu daerah, misalnya pantai, hutan, dan lain-lain (keadaan fisik suatu daerah).
2. Potensi Kebudayaan Potensi budaya adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah nenek moyang berupa bangunan, monument.
3. Potensi Manusia Manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, lewat pementasan tarian/pertunjukan dan pementasan seni budaya suatu daerah.

Potensi pariwisata tentunya akan memiliki daya tarik bagi para wisatawan, karena itu terdapat kriteria-kriteria objek wisata menjadi sebuah potensi pariwisata, pertama, *something to see; something to do dan something to buy*. Selanjutnya selain kriteria diatas terdapat faktor yang dapat menjadikan objek wisata menarik yakni kelengkapan sarana dan prasarana objek wisata. Prasarana kepariwisataan merupakan semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang, sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka antara lain, perhubungan jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara

dan laut, terminal, instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih, sistem telekomunikasi, pelayanan kesehatan, pelayanan keamanan, pelayanan wisatawan lainnya.

Adapun objek dan daya tarik wisata yang menjadi sasaran perjalanan wisata meliputi, "Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti, pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang langka, karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro (pertanian), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan. Sasaran wisata minat khusus, seperti, berburu, mendaki gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ziarah, dan lain-lain .

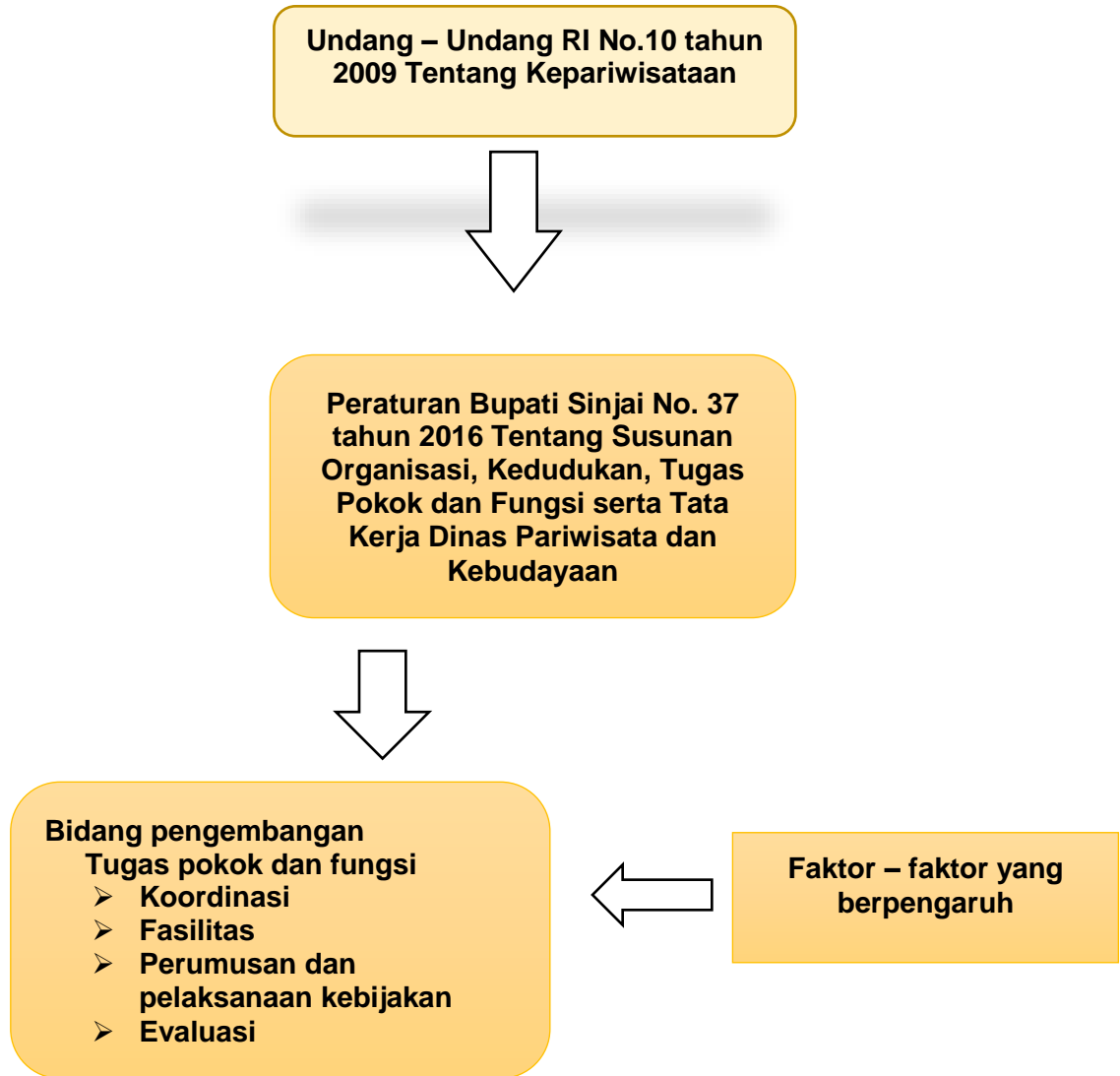
Dari pemahaman mengenai potensi pariwisata diatas dapat di kemukakan beberapa hal yang substantive terkait dengan yang dimaksud dengan potensi pariwisata yakni, setiap daya tarik wisata memiliki keunikan dan keindahan. Daya tarik dapat berupa alam, budaya, atau hasil karya manusia yang berseni tinggi dan layak untuk dijadikan suatu produk yang menjadi sasaran utama wisatawan. Potensi suatu objek wisata akan menjadi lebih optimal lagi jika setiap elemen-elemen terkait terjalin hubungan yang baik sesuai standar yang ada. Untuk itu peran pemerintah daerah dalam hal ini organisasi perangkat daerah terkait dalam pengembangan objek wisata perlu ada strategi-strategi yang dijalankan untuk memaksimalkan perannya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 1
Penelitian terdahulu

Nama	Judul	Metode analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
Karman-syah, Ahmad Firman	Kotribusi wisata hutan mangrove tongke-tongke terhadap pendapatan asli daerah sector pariwisata kabupaten Sinjai	Penelitian deskriptif	Kontribusi hutan Mangrove Tongke Tongke terhadap pendapatan asli daerah (PAD) terhadap sector pariwisata memiliki kontibusi cukup tinggi	Seberapa besar kontribusi tempat wisata hutan Mangrove Tongke-Tongke terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata kabupaten Sinjai
Adelisna, Makmur Kambolong , Lliwaul	Strategi pemerintah dalam pembangunan objek wisata pantai mileura di desa Lakarinta	Penelitian deskriptif	Factor pendukung terhadap pengembangan objek wisata mileura meliputi daya tarik objek wisata panorama indah alam yang masih terjaga, factor penghambat status lahan yang masih bermasalah, sumber daya manusia yang minim, kemananan kawasan wisata yang tidak tersedia, sarana dan prasarana yang masih minim.	Pengelolaan objek wisata Mileura dikelolah sesuai dengan strategi yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Fandy Kurniawan, Soesilo Zauhar, Hermawan	Kemitraan pengelolaan sector pariwisata (studi kasus pada Tirta Wisata kabupaten Jombang	Penelitian deskriptif	Meningkatkan kerja sama antar pihak swasta dan pihak pemerintah dalam berbagai kegiatan kepariwisataan untuk menunjang pengembangan pariwisata di Tirta Wisata	Mengangkat mengenai kemitraan sector pariwisata dalam pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki oleh Tirta Wisata berupa penyewahan lahan kepada pihak swasta.

2.7 Kerangka Konseptual



1. Menurut Undang – undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
2. Peraturan bupati nomor 73 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang dimana Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata dengan menghubungkan teori dan fungsi pemerintah..
3. Kemudian akan dicari tahu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh, faktor terkait apa yang ditemukan dalam penelitian ini. Faktor yang berpengaruh bisa jadi dari pihak pemerintah itu sendiri maupun dari pihak-pihak lain yang terkait dalam perjalanannya dalam melakukan tugasnya masing-masing.